

Penguatan Kerja Sama Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan: Perspektif Keamanan, Ekonomi, Dan Diplomasi Regional

Mersi^{1*}

¹Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email : ^{1*}amenkmersi@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sepuluh negara, Indonesia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari illegal fishing, perdagangan manusia, hingga ketimpangan pembangunan kawasan perbatasan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, dengan menelaah regulasi nasional, praktik bilateral dan multilateral, serta pengalaman internasional. Dibutuhkan analisis strategi komprehensif guna penguatan kerja sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dengan menyoroti aspek keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Temuan menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara, keterlibatan aktor domestik dan swasta, serta diplomasi regional menjadi kunci optimalisasi pengelolaan perbatasan. Selain itu, model pembangunan ekonomi berbasis kawasan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat kedaulatan negara. Makalah ini merekomendasikan integrasi kebijakan, peningkatan koordinasi antar-lembaga, dan adopsi praktik terbaik dari negara lain untuk mewujudkan pengelolaan perbatasan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perbatasan, Kerja Sama Internasional, Keamanan Maritim, Pembangunan Ekonomi, Diplomasi Regional

Abstract - As an archipelagic country that has borders with ten countries, Indonesia faces complex challenges, such as illegal fishing, human trafficking, and unequal development in border areas. This study uses a qualitative approach with a literature review by analyzing national regulations, bilateral and multilateral practices, and international experiences. A comprehensive strategic analysis is needed to strengthen cooperation in managing Indonesia's border areas, highlighting security, economic, and diplomatic aspects. The findings indicate that cross-border cooperation, the involvement of domestic and private actors, and regional diplomacy are keys to optimizing border management. Furthermore, area-based economic development models, such as Special Economic Zones, can improve the welfare of border communities while strengthening state sovereignty. This paper recommends policy integration, increased inter-agency coordination, and the adoption of best practices from other countries to achieve sustainable border management.

Keywords: Border, International Cooperation, Maritime Security, Economic Development and Regional Diplomacy.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 kilometer. Posisi geografisnya yang strategis, diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik serta di antara dua benua Asia dan Australia menjadikan Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste, dan Australia (Undang-Undang No. 43 Tahun 2008). Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, baik dari sisi keamanan, ekonomi, maupun diplomasi.

Perbatasan memiliki dimensi strategis sebagai penanda kedaulatan sekaligus ruang interaksi antarnegara. Namun, dalam praktiknya, kawasan perbatasan sering menghadapi permasalahan kompleks. Tantangan utama mencakup maraknya aktivitas illegal fishing, penyelundupan, hingga perdagangan manusia. Perselisihan patok batas dengan Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan, misalnya, menunjukkan bagaimana isu perbatasan dapat berimplikasi langsung pada hubungan diplomatik antarnegara (Azmi, 2011).

Di sisi lain, kawasan perbatasan juga menyimpan potensi strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Upaya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wini, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste, menjadi contoh bagaimana perbatasan dapat dijadikan instrumen pembangunan ekonomi sekaligus penguatan ketahanan

nasional (Nugroho, Maarif, & Yulivan, 2025). Hal ini sejalan dengan argumen bahwa pembangunan ekonomi di perbatasan dapat mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan negara (Rehatta et al., 2025).

Dalam dimensi keamanan, kerja sama bilateral dan regional merupakan kebutuhan mendesak. Kerja sama pertahanan laut Indonesia–Malaysia terbukti memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan maritim kawasan (Sualman, Ghani, & Darwis, 2025). Selain itu, kolaborasi Indonesia–Filipina dalam penanggulangan kejahatan lintas batas juga menjadi contoh keberhasilan diplomasi keamanan di perbatasan (Ujung, Hendra, & Andrias, 2025). Di era pasca-pandemi, pendekatan diplomasi non-tradisional seperti diplomasi kesehatan bahkan mulai dikembangkan sebagai strategi baru dalam memperkuat keamanan perbatasan (Madu, Nugraha, & Kusumo, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian Policy Paper ini adalah:

- 1) Bagaimana dinamika permasalahan keamanan, ekonomi, dan diplomasi di kawasan perbatasan Indonesia?
- 2) Sejauh mana kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dapat memperkuat pengelolaan perbatasan Indonesia?
- 3) Model kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pengelolaan perbatasan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan?

Tujuan penelitian Policy Paper ini adalah:

- 1) Menganalisis tantangan dan peluang pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia.
- 2) Mengevaluasi bentuk-bentuk kerja sama yang telah dijalankan, baik di tingkat nasional maupun regional.
- 3) Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis kolaborasi lintas aktor dan praktik internasional terbaik.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik pada literatur hubungan internasional dan kebijakan publik, sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan memperluas diplomasi regional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kedaulatan dan Pengelolaan Perbatasan

Kedaulatan negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara yang diakui berdasarkan hukum internasional (Undang-Undang No. 43 Tahun 2008). Dalam konteks negara kepulauan, pengelolaan perbatasan tidak hanya menyangkut aspek pertahanan, tetapi juga pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) didirikan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 untuk mengkoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan. Namun, kewenangan BNPP terbatas pada koordinasi, sehingga kolaborasi lintas lembaga dan lintas negara menjadi sangat penting (Azmi, 2011).

2.2. Dimensi Keamanan di Perbatasan

Kajian keamanan perbatasan Indonesia umumnya berfokus pada isu maritim. Studi Ujung, Hendra, & Andrias (2025) menunjukkan pentingnya penguatan kerja sama maritim Indonesia–Filipina dalam mencegah kejahatan lintas negara seperti penyelundupan dan terorisme. Demikian pula, Sualman, Ghani, & Darwis (2025) menekankan peran diplomasi pertahanan Indonesia–Malaysia dalam memperkuat keamanan maritim regional dalam kerangka ASEAN. *Isu illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)* juga menjadi salah satu ancaman serius di kawasan perbatasan laut Indonesia. Mayasari, Ali, & Risdhianto (2025) menegaskan bahwa kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia menjadi kunci dalam mengatasi praktik IUUF di wilayah perbatasan

maritim kedua negara. Dengan demikian, keamanan perbatasan bukan hanya menyangkut aspek militer, melainkan juga keamanan sumber daya alam.

2.3. Dimensi Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Selain aspek keamanan, kawasan perbatasan juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Rehata et al. (2025) menyoroti pengelolaan perikanan tuna di Selat Ombai (perbatasan Indonesia–Timor Leste) sebagai salah satu contoh pengelolaan lintas batas yang berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Nugroho, Maarif, & Yulivan (2025) mengusulkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wini, NTT, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dapat menjadi instrumen diplomasi sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

2.4. Diplomasi Regional dan Kerja Sama Multilateral

Dalam era globalisasi, pendekatan tradisional berbasis militer dianggap tidak cukup. Madu, Nugraha, & Kusumo (2025) memperkenalkan perspektif diplomasi kesehatan sebagai bentuk diplomasi non-tradisional dalam memperkuat keamanan perbatasan pasca-pandemi. Perspektif ini menegaskan bahwa isu kesehatan lintas negara, seperti pandemi COVID-19, juga berkaitan erat dengan pengelolaan perbatasan. Selain itu, kerja sama regional melalui ASEAN memainkan peran penting. Pertukaran informasi, patroli bersama, dan harmonisasi kebijakan menjadi instrumen diplomasi yang dapat mengurangi potensi konflik sekaligus meningkatkan rasa saling percaya antarnegara.

3. PEMBAHASAN

3.1. Aspek Keamanan Kawasan Perbatasan

Isu keamanan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia menghadapi berbagai ancaman maritim yang kompleks, mulai dari penyelundupan barang dan narkoba, perompakan kapal, aktivitas terorisme lintas negara, hingga praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF) yang tidak hanya merugikan perekonomian nasional tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Dalam konteks ini, Ujung, Hendra, & Andrias (2025) menunjukkan bahwa kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dan Filipina tidak hanya berperan penting dalam menekan tingkat kejahatan lintas batas di Laut Sulawesi, tetapi juga memperkuat koordinasi patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, serta membangun mekanisme kepercayaan antar aparat keamanan kedua negara, sehingga dapat menjadi model kolaborasi efektif bagi pengelolaan kawasan perbatasan maritim lainnya di Asia Tenggara.

Selain itu, Sualman, Ghani, & Darwis (2025) menegaskan bahwa diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka ASEAN memainkan peranan penting dalam memperkuat stabilitas keamanan kawasan. Diplomasi pertahanan di sini tidak hanya dipahami sebagai instrumen militer, tetapi juga sebagai mekanisme politik dan diplomatik yang mampu membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*) di antara kedua negara. Mengingat Indonesia dan Malaysia berbagi garis perbatasan laut yang cukup luas, potensi gesekan kerap muncul akibat aktivitas *illegal fishing*, pelanggaran batas wilayah, atau insiden yang melibatkan aparat keamanan. Melalui pendekatan diplomasi pertahanan, ketegangan semacam ini dapat dikelola dengan cara-cara damai, sehingga terhindar dari eskalasi konflik terbuka. Diplomasi pertahanan juga memperkuat komitmen kedua negara dalam menjaga kawasan Asia Tenggara sebagai zona damai, stabil, dan bebas dari potensi konflik bersenjata.

Ancaman *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF) merupakan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi Indonesia di kawasan perbatasan laut. Dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap seluruh zona maritimnya, khususnya di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan perbatasan dengan Malaysia. IUUF tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi negara akibat hilangnya potensi pendapatan dari sektor perikanan, tetapi juga merusak ekosistem laut dan

mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu IUUF bukan hanya persoalan keamanan maritim, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Mayasari, Ali, & Risdhianto (2025) menekankan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu strategi paling penting dalam menekan praktik IUUF di kawasan perbatasan maritim kedua negara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perbatasan laut Indonesia–Malaysia merupakan jalur yang padat aktivitas perikanan, di mana sering terjadi tumpang tindih klaim wilayah dan lemahnya pengawasan di laut lepas. Melalui mekanisme kerja sama, kedua negara dapat melakukan patroli gabungan, menyusun kesepakatan mengenai zona penangkapan, dan meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan laut. Upaya ini bukan hanya memperkuat kedaulatan masing-masing negara, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan Asia Tenggara.

Selain pendekatan bilateral, isu IUUF juga memerlukan kerangka kerja sama regional dan internasional. ASEAN, misalnya, telah berupaya membangun forum bersama untuk membahas keamanan maritim, termasuk penanggulangan praktik IUUF. Namun, efektivitas kerja sama tersebut masih sering terkendala oleh perbedaan kepentingan nasional dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum. Di tingkat global, Indonesia juga dapat memanfaatkan kerangka hukum internasional, seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), untuk memperkuat posisinya dalam menindak pelaku IUUF. Dengan demikian, pengelolaan isu IUUF membutuhkan kombinasi antara kerja sama bilateral yang konkret dengan Malaysia, kolaborasi regional melalui ASEAN, serta dukungan mekanisme hukum internasional.

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan tersebut, pendekatan keamanan di perbatasan laut Indonesia harus menekankan sinergi antara berbagai aktor: militer yang bertugas menjaga kedaulatan dan pertahanan, aparat penegak hukum yang menindak pelanggaran, serta mekanisme kerja sama internasional yang memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan. Integrasi ketiga elemen ini akan memastikan bahwa penanganan IUUF tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, dengan mengedepankan keberlanjutan sumber daya alam, perlindungan terhadap nelayan tradisional, dan stabilitas hubungan diplomatik antarnegara. Dengan demikian, isu IUUF dapat dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola perbatasan laut Indonesia secara menyeluruh.

3.2. Aspek Ekonomi dan Pembangunan Perbatasan

Selain aspek keamanan, pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan menjadi faktor krusial dalam memperkuat kedaulatan negara. Kawasan perbatasan sering kali dipandang sebagai “halaman belakang” yang tertinggal dari arus pembangunan nasional. Padahal, wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan energi. Pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan bukan hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga sebagai strategi geopolitik untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mencegah kerentanan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh aktor non-negara maupun pihak asing. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga kedaulatan negara, karena ketahanan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan akan memperkuat legitimasi negara di hadapan warganya.

Dalam konteks ini, Rehatta et al. (2025) meneliti pengelolaan perikanan tuna di Selat Ombai, wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, yang memperlihatkan bahwa kerja sama lintas negara dalam pengelolaan sumber daya alam mampu menghadirkan manfaat ganda. Pertama, kerja sama ini memberikan peluang bagi kedua negara untuk mengoptimalkan potensi perikanan dengan prinsip keberlanjutan, sehingga tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang merusak ekosistem laut. Kedua, kerja sama tersebut membuka akses pasar dan investasi yang lebih luas, sehingga masyarakat pesisir di kawasan perbatasan dapat menikmati manfaat ekonomi secara langsung. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam berbasis kerja sama lintas negara tidak hanya memperkuat aspek ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya yang penting bagi stabilitas hubungan diplomatik antarnegara.

Pentingnya pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan juga tercermin dalam program pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti yang direncanakan di Wini, Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste. Studi Nugroho, Maarif, & Yulivan (2025) menegaskan bahwa KEK ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga sebagai strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Kehadiran KEK di kawasan perbatasan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperbaiki akses infrastruktur, serta membuka ruang interaksi ekonomi yang sehat antara Indonesia dan negara tetangga. Dengan begitu, pembangunan ekonomi di perbatasan memiliki fungsi ganda: memperkuat kedaulatan sekaligus menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang menekankan kerja sama daripada kompetisi.

Lebih jauh, pembangunan ekonomi yang inklusif di kawasan perbatasan dapat mengurangi potensi konflik horizontal dan mencegah urbanisasi besar-besaran dari daerah perbatasan ke pusat-pusat kota. Ketika masyarakat perbatasan merasakan manfaat langsung dari program pembangunan, mereka akan memiliki insentif untuk tetap tinggal, berpartisipasi dalam menjaga wilayahnya, dan mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan perspektif pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, strategi pembangunan di kawasan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan kelestarian ekologi. Dengan pendekatan semacam ini, pembangunan ekonomi perbatasan akan berfungsi sebagai fondasi jangka panjang dalam memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional Indonesia.

Nugroho, Maarif, & Yulivan (2025) menekankan bahwa KEK Wini memiliki potensi untuk mendorong ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hal ini tidak terlepas dari posisi strategisnya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, sehingga memungkinkan interaksi perdagangan lintas batas yang lebih intensif. Melalui integrasi pasar dan mobilitas barang serta jasa, KEK Wini diharapkan dapat menjadi pusat distribusi produk pertanian dan perikanan, sekaligus pintu gerbang perdagangan internasional skala kecil menengah. Dengan demikian, KEK tidak hanya berfungsi sebagai zona industri atau investasi, tetapi juga sebagai katalis pembangunan ekonomi lokal yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat perbatasan.

Lebih jauh, keberadaan KEK di kawasan perbatasan juga memiliki implikasi geopolitik. Pembangunan ekonomi yang terintegrasi di wilayah perbatasan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Timor Leste. Melalui KEK Wini, kedua negara memiliki peluang memperdalam kerja sama di sektor perdagangan, logistik, hingga pendidikan dan kesehatan lintas batas. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas sosial-ekonomi kawasan, tetapi juga memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di mata negara tetangga. Dengan kata lain, pembangunan KEK berfungsi ganda: sebagai instrumen pembangunan domestik sekaligus sarana memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama regional.

Di sisi lain, tantangan dalam pengembangan KEK di perbatasan juga tidak bisa diabaikan. Keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas transportasi, dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Tanpa dukungan regulasi yang konsisten, insentif investasi yang menarik, serta koordinasi lintas lembaga yang solid, potensi KEK Wini sulit untuk diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan KEK harus didesain dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah, memperhatikan partisipasi masyarakat lokal, dan melibatkan mitra internasional. Dengan demikian, KEK di perbatasan tidak hanya menjadi proyek ekonomi semata, tetapi juga simbol keberhasilan Indonesia dalam mengelola kawasan perbatasan sebagai lokus pertumbuhan, stabilitas, dan kedaulatan nasional.

3.3. Aspek Diplomasi Regional dan Multilateral

Dimensi diplomasi dalam pengelolaan perbatasan Indonesia tidak dapat diabaikan, karena isu perbatasan bukan semata-mata persoalan domestik, melainkan juga berkaitan erat dengan stabilitas kawasan. Sebagai negara yang berbatasan dengan sepuluh negara, Indonesia memerlukan pendekatan diplomasi yang terstruktur untuk mencegah konflik dan membangun mekanisme kerja sama yang saling menguntungkan. Diplomasi perbatasan tidak hanya menyangkut negosiasi batas

wilayah, tetapi juga mencakup kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Dengan demikian, diplomasi berperan sebagai jembatan antara kepentingan nasional Indonesia dengan dinamika regional dan global yang terus berkembang dan ASEAN telah menjadi forum utama bagi Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional, khususnya terkait isu perbatasan.

Studi Sualman, Ghani, & Darwis (2025) memperlihatkan bahwa diplomasi pertahanan dalam kerangka ASEAN terbukti meningkatkan rasa saling percaya antarnegara pesisir Asia Tenggara. Rasa saling percaya ini penting untuk mengurangi potensi salah persepsi dan konflik, terutama di wilayah perbatasan yang rawan gesekan. Melalui diplomasi pertahanan, negara-negara anggota ASEAN dapat membangun mekanisme *confidence building measures* (CBM), seperti pertukaran informasi, transparansi anggaran pertahanan, serta dialog rutin antar militer. Dengan adanya CBM, negara-negara di kawasan lebih mampu mencegah konflik terbuka sekaligus memperkuat kerja sama kolektif dalam menghadapi ancaman non-tradisional.

Selain fokus pada isu pertahanan, diplomasi dalam kerangka ASEAN juga mencakup dimensi non-tradisional yang semakin relevan dalam konteks global. Misalnya, kerja sama di bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim, perdagangan lintas batas, hingga diplomasi kesehatan pasca-pandemi. Pendekatan ini sejalan dengan argumen Madu, Nugraha, & Kusumo (2025) yang menekankan pentingnya diplomasi kesehatan dalam memperkuat keamanan perbatasan Indonesia di era pasca-COVID-19. Dengan mengintegrasikan isu kesehatan ke dalam agenda diplomasi, Indonesia tidak hanya memperkuat kapasitas domestiknya, tetapi juga memperluas jangkauan pengaruhnya di tingkat regional.

Selain diplomasi tradisional berbasis pertahanan yang menitikberatkan pada aspek militer, pendekatan non-tradisional juga mulai mendapatkan perhatian dalam pengelolaan perbatasan Indonesia. Pendekatan ini muncul karena kompleksitas ancaman yang dihadapi tidak lagi terbatas pada isu keamanan klasik, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Isu-isu seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, degradasi lingkungan, serta pandemi global telah menunjukkan bahwa ancaman non-militer dapat berdampak sama seriusnya dengan ancaman militer terhadap stabilitas dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, diplomasi non-tradisional menjadi bagian penting dalam memperluas ruang lingkup kerja sama antarnegara, terutama di kawasan perbatasan yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kerawanan lintas batas.

Dalam konteks ini, Madu, Nugraha, & Kusumo (2025) memperkenalkan konsep diplomasi kesehatan sebagai instrumen baru yang potensial dalam memperkuat keamanan perbatasan pasca-pandemi. Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam bidang kesehatan, baik dalam bentuk pertukaran informasi epidemiologis, peningkatan kapasitas tenaga medis, maupun koordinasi dalam penanganan wabah penyakit menular. Pengalaman pandemi COVID-19 membuktikan bahwa negara-negara dengan wilayah perbatasan terbuka menghadapi risiko tinggi penyebaran penyakit lintas batas, sehingga diperlukan kerja sama yang lebih erat di bidang kesehatan. Diplomasi kesehatan, dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai strategi kesehatan publik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang memperkuat solidaritas regional dan membangun rasa saling percaya antarnegara.

Dengan demikian, diplomasi perbatasan Indonesia perlu mengintegrasikan pendekatan tradisional (keamanan militer dan penegakan hukum) dengan pendekatan non-tradisional (kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial-ekonomi) agar lebih adaptif terhadap dinamika global.

3.4. Sinergi Antara Keamanan, Ekonomi, dan Diplomasi

Ketiga dimensi keamanan, ekonomi, dan diplomasi pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Keamanan yang stabil menjadi prasyarat utama bagi tumbuhnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa jaminan keamanan, investor enggan menanamkan modalnya, perdagangan lintas batas akan terhambat, dan masyarakat lokal akan kehilangan rasa aman dalam beraktivitas. Dengan demikian, keamanan bukan hanya persoalan pertahanan teritorial, tetapi juga fondasi bagi terciptanya lingkungan pembangunan yang kondusif.

Keamanan yang terjaga secara konsisten akan menciptakan iklim investasi yang lebih positif di kawasan perbatasan. Investasi ini dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi khusus, hingga sektor perikanan dan pariwisata yang memiliki potensi besar di daerah perbatasan. Ketika investor merasa aman, arus modal dan teknologi akan mengalir, membuka lapangan kerja baru, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini sekaligus menjadi strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan pada aktivitas ilegal, seperti penyelundupan atau perdagangan gelap, yang kerap muncul akibat keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan yang sah.

Pembangunan ekonomi yang inklusif di kawasan perbatasan tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada peningkatan ketahanan sosial. Ketahanan sosial ini mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit dari tekanan, baik yang berasal dari faktor ekonomi maupun ancaman keamanan. Dengan adanya pembangunan yang merata, masyarakat perbatasan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini menciptakan rasa keterhubungan dengan negara, yang pada gilirannya memperkuat loyalitas masyarakat terhadap kedaulatan nasional.

Ketika pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan jaminan keamanan, kerentanan masyarakat terhadap aktivitas ilegal dapat ditekan secara signifikan. Selama ini, lemahnya pembangunan sering kali memaksa masyarakat perbatasan untuk terlibat dalam kegiatan ilegal sebagai sumber penghasilan alternatif. Namun, dengan adanya pembangunan ekonomi yang memberikan peluang kerja formal dan akses ke pasar, motivasi untuk terlibat dalam aktivitas ilegal semakin berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan dan ekonomi bukanlah dua entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan satu sama lain.

Sinergi antara keamanan, ekonomi, dan diplomasi juga berkontribusi pada pembentukan citra positif Indonesia di mata dunia. Keberhasilan mengelola perbatasan secara damai, produktif, dan inklusif akan memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara yang stabil, terbuka terhadap kerja sama, dan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Citra ini pada gilirannya akan menarik lebih banyak mitra internasional untuk bekerja sama dengan Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun keamanan. Dengan kata lain, keberhasilan pengelolaan perbatasan dapat menjadi bagian dari diplomasi soft power Indonesia.

Pada akhirnya, pengelolaan perbatasan yang mengintegrasikan keamanan, ekonomi, dan diplomasi akan menciptakan sistem yang lebih resilien dan berkelanjutan. Keamanan menjamin stabilitas, ekonomi mendorong kesejahteraan, dan diplomasi membangun legitimasi serta kerja sama internasional. Tanpa salah satu dari tiga pilar ini, pengelolaan perbatasan akan timpang dan rentan terhadap krisis. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat sinergi ketiga dimensi tersebut untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi menjadi titik rawan, melainkan menjadi lokus pertumbuhan, stabilitas, dan simbol kedaulatan negara.

Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan Indonesia perlu didasarkan pada prinsip kolaborasi lintas aktor: pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, sektor swasta, masyarakat lokal, hingga organisasi internasional.

4. SOLUSI DAN REKOMENDASI

4.1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Nasional

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan perbatasan Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga. BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) selama ini hanya berfungsi sebagai koordinator, sementara eksekusi kebijakan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Kondisi ini menimbulkan inefisiensi serta lemahnya respons terhadap persoalan di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi tata kelola kelembagaan, baik melalui penguatan kewenangan BNPP maupun peningkatan sinergi antar instansi terkait. Integrasi kebijakan pusat dan daerah juga harus diperkuat, agar pembangunan perbatasan tidak terhambat oleh perbedaan prioritas atau keterbatasan kapasitas pemerintah daerah.

4.2. Strategi Keamanan Maritim dan Darat yang Adaptif

Untuk menghadapi ancaman *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF), penyelundupan, dan terorisme lintas negara, Indonesia perlu mengembangkan strategi keamanan yang adaptif. Patroli gabungan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina, harus diperluas cakupannya, tidak hanya di laut tetapi juga di darat pada kawasan yang rawan perdagangan ilegal. Penerapan teknologi modern, seperti sistem satelit, *automatic identification system* (AIS), dan drone, dapat membantu meningkatkan pengawasan perbatasan yang luas. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan bersama, pertukaran informasi intelijen, dan koordinasi lintas batas.

4.3. Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan sering kali tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada keberlanjutan. Program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti di Wini (NTT), harus didukung dengan infrastruktur transportasi, listrik, telekomunikasi, dan akses pasar. Selain itu, pengelolaan perikanan lintas batas dengan Timor Leste dan negara tetangga lainnya harus berbasis prinsip keberlanjutan, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa merusak ekosistem laut. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui koperasi, UMKM, dan pendidikan vokasi juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan perbatasan.

4.4. Diplomasi Regional dan Multilateral yang Progresif

Diplomasi tetap menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Indonesia perlu lebih aktif memanfaatkan forum ASEAN sebagai wadah koordinasi regional, terutama dalam isu keamanan maritim dan pembangunan ekonomi lintas batas. Diplomasi pertahanan, seperti yang dilakukan dengan Malaysia dan Filipina, harus diperluas ke bentuk diplomasi non-tradisional, misalnya diplomasi kesehatan pasca-pandemi. Dengan memperkuat kerja sama multilateral, Indonesia tidak hanya dapat memperkuat posisi tawarnya di kawasan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun stabilitas regional yang saling menguntungkan.

4.5. Kolaborasi Lintas Aktor dan Pendekatan Partisipatif

Pengelolaan perbatasan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi internasional perlu dilibatkan secara aktif. Kolaborasi lintas aktor ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak hanya top-down, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat perbatasan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, mengelola sumber daya, dan memanfaatkan peluang ekonomi akan memperkuat rasa memiliki terhadap wilayah perbatasan. Dengan pendekatan partisipatif, kebijakan perbatasan akan lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

4.6. Adopsi Praktik Terbaik Internasional

Indonesia dapat belajar dari praktik internasional dalam mengelola perbatasan. Misalnya, Uni Eropa memiliki mekanisme kerja sama lintas batas yang memfasilitasi perdagangan, mobilitas tenaga kerja, serta pembangunan sosial-ekonomi bersama. Meskipun konteksnya berbeda, beberapa prinsip seperti integrasi kebijakan, transparansi, dan kolaborasi multi-level dapat diadaptasi ke dalam konteks ASEAN dan Indonesia. Dengan mengadopsi praktik terbaik ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perbatasan sekaligus memperkuat posisinya dalam forum global.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia merupakan isu multidimensional yang mencakup aspek keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga membutuhkan pendekatan integratif dan kolaboratif. Dari sisi keamanan, tantangan berupa *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF), penyelundupan, hingga terorisme lintas negara menuntut strategi pengawasan adaptif yang diperkuat dengan kerja sama

bilateral maupun regional. Keamanan yang stabil akan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan.

Pada dimensi ekonomi, pembangunan kawasan perbatasan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Ekonomi perbatasan yang inklusif akan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap aktivitas ilegal, sekaligus membuka peluang diplomasi ekonomi dengan negara tetangga. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen domestik, tetapi juga sebagai strategi geopolitik dalam menjaga kedaulatan negara.

Dari perspektif diplomasi, ASEAN telah menjadi forum utama bagi Indonesia dalam membangun koordinasi regional. Diplomasi pertahanan yang dijalankan bersama negara-negara tetangga terbukti meningkatkan rasa saling percaya, sementara pendekatan non-tradisional seperti diplomasi kesehatan pasca-pandemi memberikan perspektif baru dalam menjaga keamanan manusia di kawasan perbatasan. Diplomasi yang proaktif, baik bilateral maupun multilateral, memperkuat legitimasi Indonesia sekaligus memperluas ruang kerja sama regional yang damai dan saling menguntungkan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan kerja sama lintas dimensi menjadi kunci bagi pengelolaan perbatasan Indonesia yang efektif. Solusi strategis yang dapat diambil meliputi: reformasi kelembagaan BNPP, adopsi teknologi pengawasan maritim, pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, diplomasi regional yang progresif, serta kolaborasi lintas aktor dengan melibatkan masyarakat perbatasan. Integrasi dari berbagai strategi tersebut akan memastikan bahwa kawasan perbatasan bukan lagi dipandang sebagai titik rawan konflik, melainkan sebagai lokus pertumbuhan, stabilitas, dan simbol kedaulatan Indonesia di kawasan regional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, D. (2011). *Kajian arsip wilayah perbatasan negara dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Mayasari, E., Ali, Y., & Risdianto, A. (2025). Bilateral relations between Indonesia and Malaysia in handling illegal fishing in maritime border areas. *Journal of Social Research*, 3(2), 55–67. <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/download/2721/1529>
- Madu, L., Nugraha, A., & Kusumo, Y. W. (2025). Redefining border security: Indonesia's health diplomacy perspective in the post-pandemic era. *SHS Web of Conferences*, 215, 02006. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521502006>
- Nugroho, B. A., Maarif, S., & Yulivan, I. (2025). Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Perbatasan Wini, Indonesia dengan Oecusse, Timor Leste. *Ranah Research Journal*, 3(1), 88–102. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/1412/1227>
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Rehatta, B. M., Paulus, C. A., Gana, F., & Merryanto, Y. (2025). Sustainability of tuna fisheries management in the border areas of Indonesia and Timor Leste in the Ombai Strait. *International Journal of Conservation Science*, 16(1), 217–230. https://ijcs.ro/public/IJCS-25-01_17_Rehatta.pdf
- Sualman, I., Ghani, M. S. A., & Darwis, Y. (2025). Strengthening maritime security through defence diplomacy: A case study of Malaysia–Indonesia naval cooperation within ASEAN. *Pertanika Proceedings*, 1(4), 165–179. [http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/PP%20Vol.%201%20\(4\)%202025%20\(View%20Full%20Journal\).pdf#page=165](http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/PP%20Vol.%201%20(4)%202025%20(View%20Full%20Journal).pdf#page=165)
- Ujung, P., Hendra, A., & Andrias, A. (2025). Prioritas penguatan kerjasama keamanan maritim Indonesia-Filipina. *Centurion Journal*, 7(1), 24–39. <https://jurnal.patriotbangsapublisher.com/centurion/article/download/24/24>
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.